



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Aksi ini. Dokumen ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak yang terkait, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, baik berupa ide, saran, maupun tenaga dalam penyusunan dokumen ini.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya Rencana Aksi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih.

Palembang, 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN



H. Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681120 198903 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui penyediaan sumber protein hewani. Di Provinsi Sumatera Selatan, potensi sumber daya perairan umum daratan, pesisir, dan laut yang luas menjadikan sektor ini sebagai salah satu tumpuan utama dalam mendukung ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki mandat untuk mengelola, membina, mengawasi, serta mengembangkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar memberikan manfaat ekonomi yang optimal tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Peran ini semakin penting sejalan dengan visi pembangunan daerah “*Sumsel Maju Untuk Semua*” yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan, keterkaitan ketahanan pangan, energi, dan lingkungan, serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun capaian produksi perikanan tangkap dan budidaya mengalami peningkatan, dampaknya terhadap kesejahteraan pelaku utama—yang tercermin dari indikator **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** dan **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)**—belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi perlu diarahkan pada efisiensi biaya usaha, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, penguatan akses pasar, serta pembenahan rantai distribusi.

Di sisi lain, masih ditemui beberapa permasalahan strategis seperti keterbatasan sarana prasarana produksi di sentra-sentra perikanan, belum meratanya penerapan teknologi budidaya, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan regulasi, belum optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam konsumsi ikan. Tantangan perubahan iklim dan degradasi kualitas lingkungan perairan juga menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan

suatu dokumen operasional yang mampu menjabarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ke dalam langkah-langkah aksi yang terukur, sistematis, dan terarah. Rencana Aksi ini disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat difokuskan secara langsung pada pencapaian indikator kinerja utama, khususnya peningkatan NTN dan NTPi sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Rencana Aksi ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan UPTD dalam melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien, sekaligus sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan adanya Rencana Aksi ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan pada Tahun 2026 tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku utama sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan Program/Kegiatan selama periode Tahun 2025-2029 dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan yang mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan Kelautan dan Perikanan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bertujuan :

1. Sebagai dokumen informasi mengenai program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang akan dijadikan target pencapaian oleh aparatur serta stakeholders terkait; selain itu juga untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara provinsi dan pusat, serta antara provinsi dengan kabupaten/kota;
2. Terwujudnya perencanaan bidang urusan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berkualitas, kolaboratif, dan akuntabel;
3. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Terakomodirnya nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
6. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat kelautan dan perikanan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya

melalui pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 seperti berikut :

Bab 1 Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan Tujuan serta sistematika laporan
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi
Bab III Penutup	Menyajikan penjelasan singkat Mengenai peran penting penyusunan rencana aksi

BAB II RENCANA AKSI

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu acuan dan dasar kebijakan atau pengambilan keputusan untuk mengarahkan pembangunan untuk lebih fokus dan teratur. Di dalam penyusunannya diperlukan perencanaan pembangunan yang baik dan berlandaskan pada faktor-faktor ekonomi, sosial politik dan budaya suatu daerah, sehingga potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Penyusunan perencanaan yang baik menggunakan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang meliputi INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan sektoral Kelautan dan Perikanan sebagai turunan dari RPJMD Sumatera Selatan disusun sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	nilai	117,43	117,5	117,87	118,18	118,45	118,92	119,5	
2	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	nilai	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,8	95,1	

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	117,87
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	94,47
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	81,00

C. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai				117,87
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai				94,47
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai				81,00

D. ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

Tabel 5. Alokasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang bersumber dari APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	24.133.182.849,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	Rp	153.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	745.000.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	1.295.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	130.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	650.500.000,00	APBD
TOTAL APBD			27.106.682.849,00	

Tabel 3. Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sector unggulan daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan/NTN	117,43	117,5	117,87	118,18	118,45	118,42	119,5
		Meningkatnya Produktivitas Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	94,84	94,32	94,47	94,51	94,64	94,8	95,1
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.918	162.017	165.337	168.644	172.017	175.457	178.966
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	292.217	293.752	295.286	305.000	315.000	325.000	335.000
			Nilai Evaluasi AKIP	80,01	80,5	81	81,5	82	82,5	83